**DAFTAR PUSTAKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. (2022). *BUKU PROFIL Dinas Kominfo Kabupaten Tegal*. (13 Maret 2023).

Fitriya. (2020). *Jawaban Mengapa Data Penerimaan Pajak Tercantum dalam APBN*. Mekari Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/mengapa-data-penerimaan-pajak-tercantum-dalam-apbn-2/. (21 Maret 2023).

Harjo, D., Prihadini, D., & Agustianto, J. P. (2016). *BUKU AJAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK*. (8 Juni 2023).

Maalangga, M. A., Warongan, J. D. L., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, *5*(1), 8. (7 Juni 2023).

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah*. Kabupaten Tegal.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal*.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2014 Tentang Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pajak*. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2019 Tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.

PT. Kykasena Arta Mandiri. (2019). *Sistem E-DTH Kabupaten Tegal*. DTH (Daftar Transaksi Harian). https://kabtegal.simdth.com/Login.

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPh FINAL PADA KPP PRATAMA MANADO. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(4), 362–370. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26289.2019. (7 Juni 2023).

Putra, T.A. (2023). Pengenalan Sistem E-DTH. Kabupaten Tegal.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahum 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Jakarta.

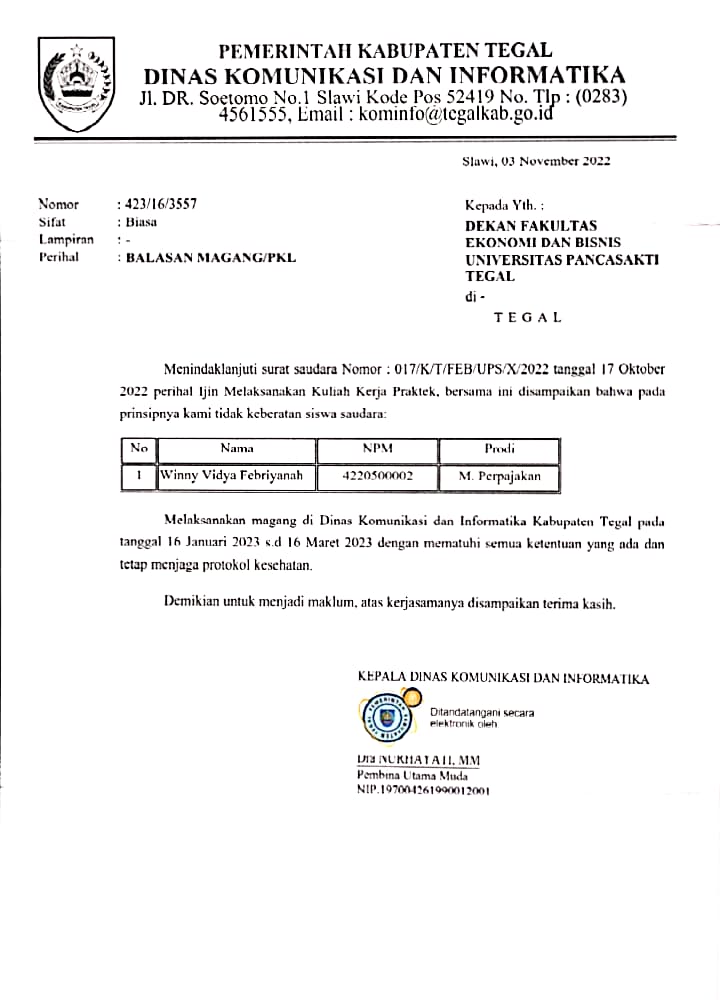
Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek dalam negeri dan subjek pajak luar negeri*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta.

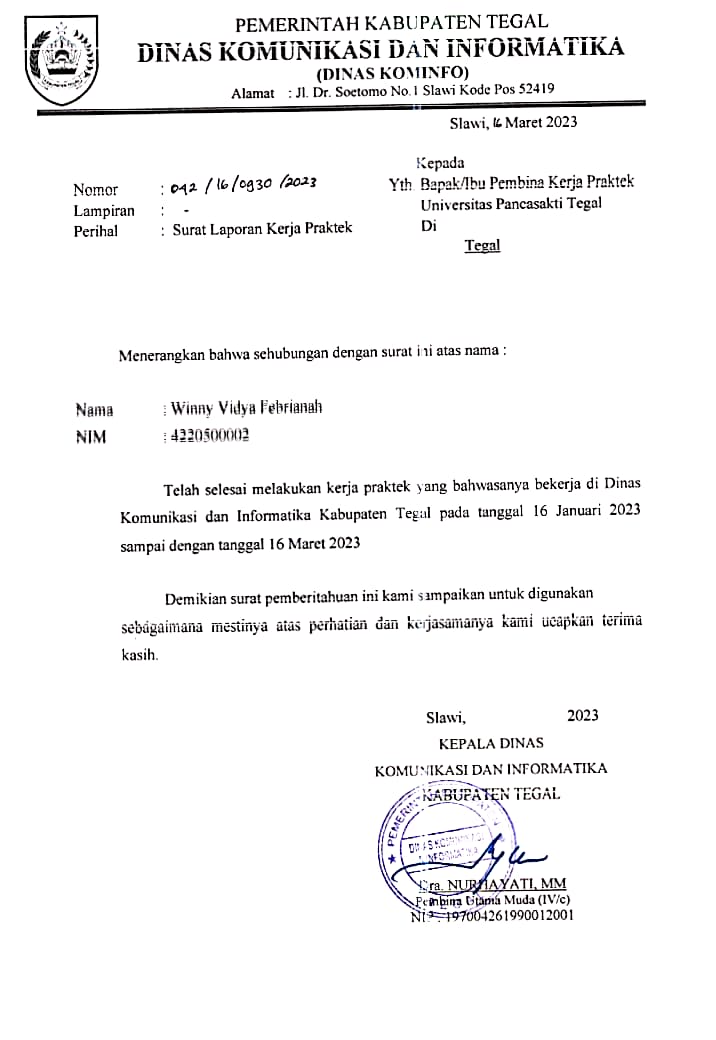
Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). *FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAU DIBEBASKAN :* *VIII*, 91–104. (7 Juni 2023).

**LAMPIRAN**

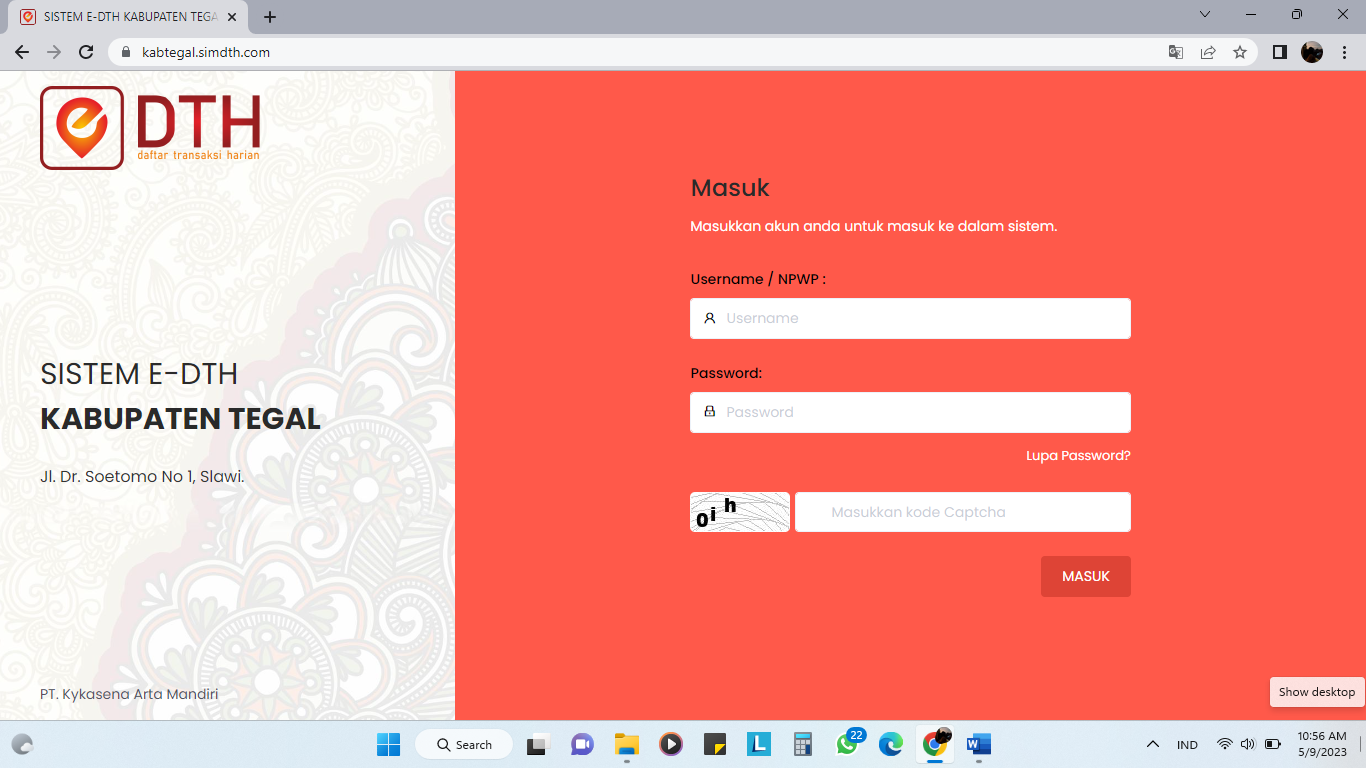
1. Surat Keterangan Magang dari Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

****

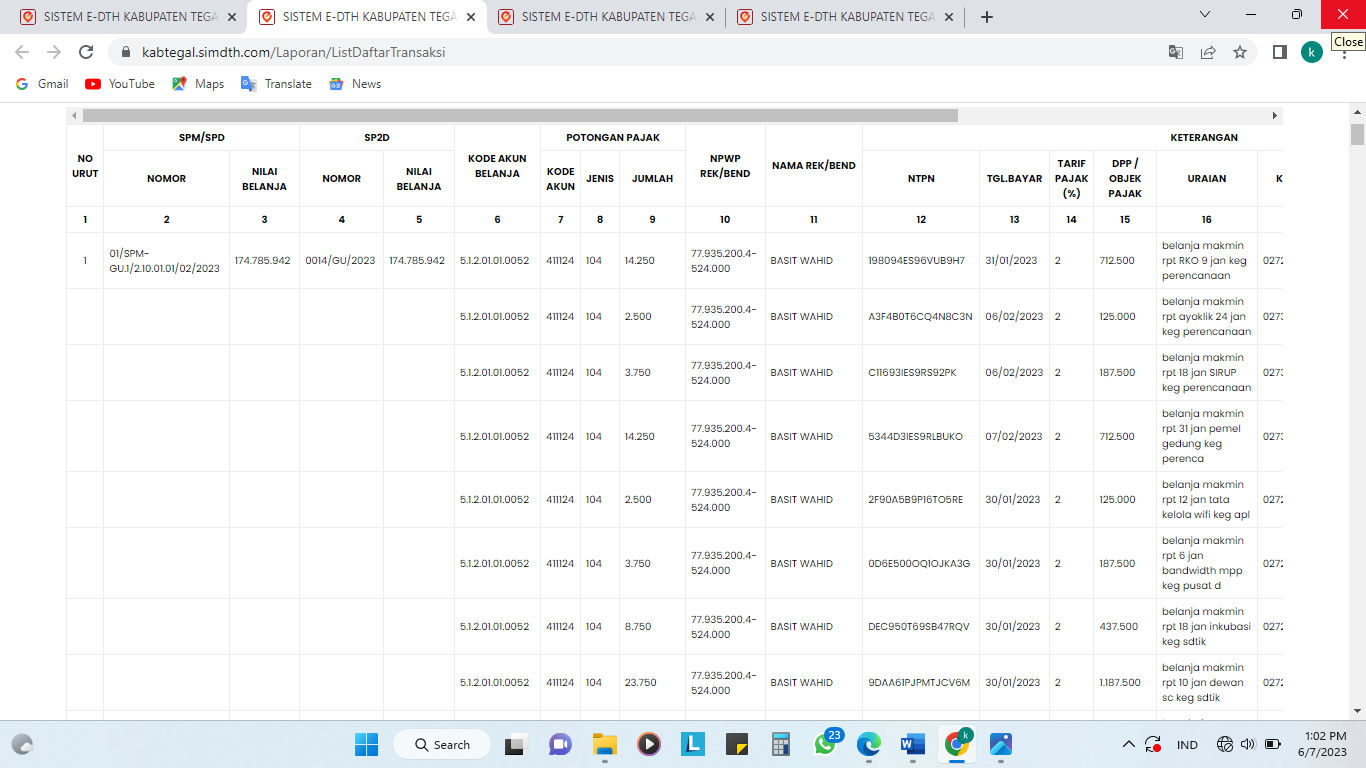
1. Surat Keterangan Selesai Magang dari Instan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

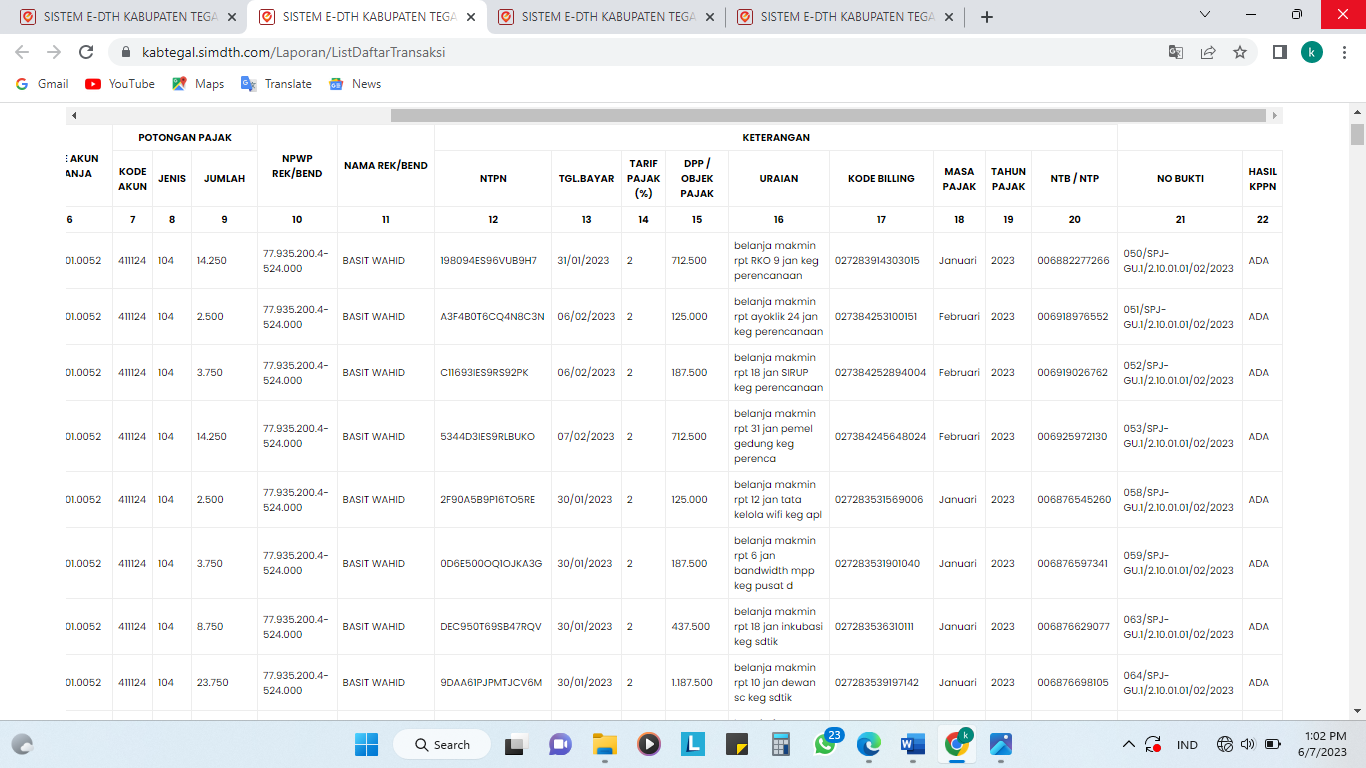


1. Sistem E-DTH Kabupaten Tegal



1. Elemen DTH dalam Sistem E-DTH





1. Lembar Wawancara Praktek Kerja Lapangan

